

BAB III

KERJA SAMA KEDUA NEGARA MENGGUNAKAN VARIABEL

MULTIPLE CHANNELS

Bab ini membahas mengenai apa saja bentuk kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan di wilayah Muara Tami. Penggunaan teori *Complex Interdependency* dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar penulis dalam menjelaskan implementasi kerja sama kedua negara dan teori tersebut relevan dengan studi perbatasan karena salah satu variabel yaitu *Multiple Channels* dapat membantu penulis untuk dijadikan indikator dalam menjelaskan bentuk kerja sama dan siapa saja aktor dalam kerja sama kedua negara.

3.1 Hubungan Multiple Channels antara Indonesia dan Papua Nugini dalam isu perbatasan di Muara Tami

Tranmission belt dalam variabel Multiple Channels yang ada dalam teori Complex Interdepedency dibuku Power and Interdepedence oleh Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa *Tranmission belt* adalah cara aktor non-pemerintah, seperti perusahaan atau kelompok masyarakat, memengaruhi hubungan antarnegara. Daripada hanya mengandalkan jalur formal antar pemerintah (seperti menteri luar negeri atau kedutaan besar) pengaruh disalurkan melalui aktivitas-aktivitas non-pemerintah ini.⁸⁴

⁸⁴ Robert O. Keohane and Nye, *Power and Interpedence*.

3.1.1 Komunikasi Antara Dua Birokrasi Pemerintah

Mekanisme komunikasi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dalam pengelolaan perbatasan darat yang membentang luas di Pulau Papua diwadahi secara formal dan struktural di bawah Komite Perbatasan Bersama atau *Joint Border Committee* (JBC). JBC berfungsi sebagai arsitektur kelembagaan tingkat tinggi yang memastikan bahwa isu-isu lintas batas ditangani secara komprehensif, mulai dari aspek keamanan hingga kesejahteraan masyarakat.⁸⁵

Joint Border Committee adalah forum utama dan payung komunikasi strategis yang dirancang untuk membahas isu-isu strategis kerja sama bilateral terkait permasalahan di Kawasan Perbatasan. Mandat utamanya adalah menyetujui langkah-langkah strategis yang mencerminkan kepentingan kedua negara, dengan fokus pada pengelolaan perbatasan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memajukan keamanan di perbatasan bersama.⁸⁶

Frekuensi komunikasi JBC bersifat teratur dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Sidang JBC ke-38 yang membahas isu strategis antara RI-PNG dilaksanakan pada bulan Desember 2024, menunjukkan komitmen kedua negara terhadap dialog perbatasan yang terstruktur. Dalam persidangan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi

⁸⁵ Kusnadi, "Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pengesahan 'Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea.'"

⁸⁶ Muh. Ardiansyah Putra, "Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Guinea Melalui Joint Border Committee (Jbc) Di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 – 2020" 3, no. 5 (2021): 6, [http://digilib.uinsa.ac.id/49329/2/Muh. Ardiansyah Putra_I72217071.pdf?](http://digilib.uinsa.ac.id/49329/2/Muh._Ardiansyah_Putra_I72217071.pdf?)

Kewilayahan (Plh. Dirjen Bina Adwil), sementara delegasi PNG dipimpin oleh *Secretary of Department of Provincial and Local Government Affairs*.⁸⁷

Pilihan kepemimpinan delegasi dari sektor Administrasi Kewilayahan (di Indonesia, di bawah Kementerian Dalam Negeri) dan urusan Pemerintahan Provinsi/Lokal (di PNG) memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara strategis, pengelolaan perbatasan RI-PNG diprioritaskan sebagai isu *governance* dan *welfare development*, yang kemudian diperkuat oleh aspek keamanan. Komunikasi di tingkat JBC diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama (*mutual understanding*) untuk memastikan setiap langkah strategis dapat menunjang kesejahteraan rakyat dan memajukan keamanan kedua negara.⁸⁸ Hasil rapat dari Joint Border Commite akan diturunkan ke forum Border Liasion Meeting untuk dikelola berdasarkan instansi lapangan seperti Imigrasi, Bea Cukai, BNPP dan petugas Kemananan seperti TNI.

3.1.2 Interaksi Lintas Non Pemerintah, LSM, Organisasi Lintas negara, Lembaga riset, Universitas, Entitas Bisnis.

Dalam penerapan kerja sama perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, *Melanesian Spearhead Gruop* turut andil dalam mendorong penerapan keamanan regional. Pada awalnya *Melanesian Spearhead Group* (MSG) didirikan dalam sebuah pertemuan informal yang diadakan di Goroka, Papua Nugini pada tanggal 17 Juli 1986 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu serta perwakilan dari Front de Liberational the Nationale

⁸⁷ Bina Administrasi Kewilayahan, "Sidang JBC Ke-38 Jadi Upaya Bersama RI-PNG Untuk Kemajuan Kawasan Perbatasan."

⁸⁸ Bina Administrasi Kewilayahan.

Kanak et Solcialiste (FLNKS) Kaledonia Baru. Pertemuan tersebut mengikuti visi para Pemimpin ini, yang didukung oleh keinginan politik yang kuat dan bersama, untuk dekolonisasi dan kemerdekaan seluruh negara dan wilayah Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan, sehingga mengembangkan identitas dan hubungan budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang lebih kuat antara masyarakat dan komunitas Melanesia. Kemudian, Timor Leste dan Republik Indonesia bergabung sebagai Pengamat pada tahun 2011. Dan pada tahun 2015, Republik Indonesia diberikan Keanggotaan Asosiasi yang mewakili lima Provinsi Melanesia di Indonesia, sementara Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat diterima sebagai Pengamat.⁸⁹

Adapun tujuan politik MSG adalah MSG akan menjadi 'busur stabilitas' atau wadah dan forum untuk tata kelola yang baik, stabilitas politik, kemerdekaan politik masyarakat Melanesia, perdamaian abadi, persatuan dan kebebasan dari segala bentuk penindasan dan pengaruh negatif, investasi berkelanjutan dalam pembangunan perdamaian, komitmen terhadap integrasi regional di tingkat nasional untuk mewujudkan sub-regionalisme yang terintegrasi dengan baik, mengurangi ketergantungan bantuan, kebanggaan nasional untuk mempromosikan kebersihan dan keindahan, menghindari korupsi, menghormati hukum dan ketertiban, keberanian, pengetahuan dan tekad untuk membentuk masa depan kita sendiri yang kita cita-citakan untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kemakmuran yang abadi.⁹⁰

⁸⁹ Sekretariat Msg, "Tentang Msg – Sekretariat Kelompok Pelopor Melanesia," Melanesian Spearhead Group, 2021, <https://Msgsec.Info/About-Msg/>.

⁹⁰ Msg.

Dalam studi kasus kerja sama perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, *Melanesian Spearhead Group* yang menjadi organisasi sub-regional secara langsung menjadi forum untuk menyelesaikan masalah-masalah separatis di wilayah perbatasan kedua negara. Papua New Guinea adalah anggota pendiri dan pemain dominan dalam MSG. Kepentingan utama Papua New Guinea adalah menjaga stabilitas regional dan memelihara keseimbangan geopolitik yang rumit. Papua New Guinea harus menjaga solidaritas dengan negara-negara Melanesia lainnya sambil secara simultan mengamankan kerja sama yang erat dan stabil dengan Indonesia, mitra bilateral terdekatnya. Perbatasan darat yang dibagi bersama dengan Indonesia memberikan PNG bobot strategis yang tidak proporsional dalam forum MSG. Indonesia menganggap PNG sebagai mitra paling intim dan terdekat dalam diplomasi dan lobi internasional terkait isu di Pulau Papua. Kenyataan bahwa Papua New Guinea mengontrol satu-satunya perbatasan darat menjadikan negara tersebut saluran geopolitik penting bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan blok Melanesia yang lebih luas.⁹¹

Selanjutnya dengan masuknya Indonesia ke dalam MSG adalah strategi diplomatik yang diperhitungkan. Tujuan utamanya bersifat defensif untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya dari ancaman eksternal dan upaya lobi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua di forum regional. Dengan menjadi Associate Member, Indonesia dapat secara aktif memengaruhi narasi dan keputusan MSG.⁹² Fungsi paling penting dari MSG dalam

⁹¹ Farneubun, "Indonesia-Png Cooperation: Papua Strategic Roles."

⁹² Rienlas Wideslatu, "Diplomatic Strategy Of The Indonesian Government In Maintaining Papua As Part Of" 1, no. 1 (2024): 816–37, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2957>.

konteks kerja sama perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea adalah perannya sebagai platform politik dan diplomatik tingkat tinggi untuk menegaskan prinsip-prinsip kedaulatan dan membatasi ruang gerak diplomasi separatistis walaupun MSG tidak secara langsung mengelola operasi keamanan di perbatasan, kerangka kerjanya sangat penting dalam melegitimasi dan menyelaraskan upaya keamanan bilateral antara Indonesia dan Papua New Guinea.

Selanjutnya peran Multinational Company (MNC) dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini di wilayah perbatasan Muara Tami, PT PLN (Persero) telah bertransformasi menjadi aktor Multinational Corporation (MNC) yang strategis dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui ekspansi layanan energi lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebagai entitas bisnis berbentuk Perseroan Terbatas (PT), PLN memiliki kemandirian hukum yang memungkinkannya menjalin kesepakatan komersial internasional dengan entitas asing, dalam hal ini melalui kemitraan teknis bersama PNG Power Ltd sebagai operator listrik nasional Papua Nugini. Peran MNC ini diwujudkan secara nyata melalui proyek ekspor listrik dari sistem kelistrikan Jayapura menuju wilayah Wutung, Papua Nugini, yang memanfaatkan jaringan distribusi di wilayah Skouw. Dengan cadangan daya (reserve margin) sebesar 42 MW dari total kapasitas 136,6 MW di Jayapura, PLN tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga memiliki kapasitas yang memadai untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi bagi wilayah tetangga di masa depan.⁹³

⁹³ Rifky Syofiadi, "Kolaborasi Dengan Png Power, Pln Siap Pasok Listrik Di Perbatasan Papua Nugini - Pt Pln (Persero)," Pt Pln (Persero), 2023, <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran->

Keberadaan PLN sebagai penyedia energi di kancah internasional ini membawa dampak signifikan bagi integrasi ekonomi dan diplomasi di kawasan Pasifik. Melalui infrastruktur kelistrikan yang dibangun, PLN berhasil memicu pertumbuhan ekonomi di titik-titik perdagangan lintas batas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Papua Nugini yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi stabil. Selain memperkuat kedaulatan energi nasional, keterlibatan PLN sebagai perusahaan multinasional juga membuka peluang bagi kerja sama energi yang lebih luas, termasuk potensi pertukaran energi ramah lingkungan dari sumber hidro dan panas bumi yang melimpah di wilayah Papua Nugini kembali ke Indonesia di masa mendatang.⁹⁴

Selanjutnya, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI memegang peranan penting sebagai Multinational Corporation (MNC) transportasi yang menghubungkan mobilitas penduduk dan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Dalam kapasitasnya sebagai operator transportasi publik, DAMRI mengoperasikan layanan angkutan lintas batas negara yang menghubungkan Jayapura (Papua) dengan Vanimo (Sandaun, PNG) melalui jalur darat yang terintegrasi. Peran multinasional ini diwujudkan melalui pengoperasian bus angkutan yang tidak hanya memfasilitasi perjalanan warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi tulang punggung transportasi bagi warga Papua Nugini yang melakukan perjalanan lintas batas untuk kebutuhan perdagangan dan layanan

Pers/2023/07/Kolaborasi-Dengan-Png-Power-Pln-Siap-Pasok-Listrik-Di-Perbatasan-Papua-Nugini/.

⁹⁴ Ardito Ramadhan Fika Nurul Ulya, "Jokowi Ungkap PLN Sudah Aliri Listrik Di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/12530001/jokowi-ungkap-pln-sudah-aliri-listrik-di-perbatasan-indonesia-papua-nugini>.

kesehatan di Jayapura. Integrasi layanan ini menunjukkan bahwa DAMRI bertindak sebagai agen penghubung ekonomi yang melampaui batas kedaulatan negara, serta mendukung penguatan konektivitas darat sesuai dengan kesepakatan bilateral kedua negara dalam kerangka Joint Border Committee.⁹⁵

Layanan angkutan lintas batas ini memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kawasan perbatasan dengan menurunkan biaya logistik dan mempermudah akses distribusi barang-barang kebutuhan pokok dari Indonesia ke wilayah perbatasan Papua Nugini. Keterlibatan DAMRI sebagai MNC transportasi juga mencakup koordinasi teknis dengan otoritas transportasi Papua Nugini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan keamanan internasional di sepanjang rute perbatasan. Keberhasilan DAMRI dalam mempertahankan operasional rute internasional ini menjadi bukti nyata peran strategis perusahaan negara sebagai pemain global yang mendukung integrasi ekonomi di kawasan Pasifik Selatan.⁹⁶

Selanjutnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjalankan peran strategis sebagai (MNC) melalui penyediaan infrastruktur digital dan konektivitas internet lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini. Peran ini diwujudkan melalui kemitraan strategis antara Telkom melalui anak perusahaannya, Telin (Telkom Indonesia International), dengan entitas

⁹⁵ Admin Web Papua, "Pj. Sekda Papua Tinjau Kesiapan Pembukaan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Jayapura–Vanimo (PP)," Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua, 2025, <https://papua.go.id/view-detail-berita-9397/pj-sekda-papua-tinjau-kesiapan-pembukaan-angkutan-lintas-batas-negara-albn-jayapuravanimop-p.html>.

⁹⁶ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, "BPTD Kelas II Papua Perpanjang Rute Transportasi Wilayah Perbatasan," Publikasi BPTD Kelas II Papua, 2023, <https://hubdat.kemenuhub.go.id/id/bptd/papua/publikasi/bptd-kelas-ii-papua-perpanjang-rute-transportasi-wilayah-perbatasan/>.

telekomunikasi nasional Papua Nugini, Dataco, untuk pemanfaatan bersama infrastruktur kabel laut internasional. Sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa saham (Tbk), Telkom memiliki kapasitas komersial global untuk mendistribusikan bandwidth internet yang dibeli dari infrastruktur Indonesia guna memperkuat ketersediaan jaringan digital di wilayah Papua Nugini. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup penyediaan layanan data, tetapi juga mencakup aspek teknis dalam menjaga stabilitas konektivitas digital di kawasan Pasifik yang menjadi pilar penting bagi aktivitas ekonomi dan koordinasi petugas di sepanjang garis perbatasan.⁹⁷

Kehadiran infrastruktur telekomunikasi yang dikelola oleh Telkom memberikan dampak domino pada integrasi ekonomi digital di titik-titik lintas batas seperti Skouw dan Wutung. Dengan tersedianya layanan seluler dan internet yang stabil, aktivitas perdagangan lintas negara serta transaksi keuangan di pasar perbatasan dapat berjalan lebih efisien dan aman, mendukung visi kedua negara untuk membentuk zona ekonomi khusus di masa depan. Selain itu, kerja sama infrastruktur digital ini menjadi fondasi bagi pengembangan literasi digital dan akses informasi bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosiokultural antar bangsa. Status Telkom sebagai pemain multinasional di sektor teknologi informasi ini membuktikan bahwa BUMN

⁹⁷ Telin By Msel, "Telin and PNG DataCo Agree on Long-Term Bilateral Cooperation of Iru & Lpa," Telin Net Company, 2016.

Indonesia mampu menjadi penyedia solusi teknologi global yang mendukung stabilitas dan kemajuan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.⁹⁸

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong peran BUMN di bidang konstruksi, seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, untuk bertindak sebagai Multinational Corporation (MNC) melalui partisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan di Papua Nugini. Keterlibatan ini merupakan bagian dari tawaran kerja sama strategis untuk mendukung program nasional Papua Nugini, yaitu "Connect PNG", yang bertujuan membangun konektivitas jalan nasional secara masif hingga tahun 2040. Fokus utama dari kerja sama ini adalah pembangunan dan peningkatan kualitas akses jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan, mulai dari titik Wutung hingga menuju pusat ekonomi di Vanimo, guna memperlancar arus logistik dan mobilitas penduduk antar kedua negara. Sebagai MNC yang berpengalaman dalam proyek internasional, BUMN konstruksi Indonesia membawa keahlian teknis dan standar pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat integrasi fisik di kawasan perbatasan Pasifik Selatan tersebut.⁹⁹

Pembangunan infrastruktur jalan ini memiliki nilai strategis karena fungsi jalan raya tersebut tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai urat

⁹⁸ Kementerian Komunikasi Dan Digital, "Jajaki Kerjasama Teknologi Dua Negara, Papua Nugini Sambangi Kantor SDPPI," Ditjen Infrastruktur Digital, 2024, [https://postel.go.id/berita-jajaki-kerjasama-teknologi-dua-negara-papua-nugini-sambangi-kantor-sdppl-27-6189#:~:text=Peremuan bilateral pertama ini menjadi titik awal,dalam Closing Remarks Technical Coordination Meeting \(26/04/2024\)](https://postel.go.id/berita-jajaki-kerjasama-teknologi-dua-negara-papua-nugini-sambangi-kantor-sdppl-27-6189#:~:text=Peremuan%20bilateral%20pertama%20ini%20menjadi%20titik%20awal,dalam%20Closing%20Remarks%20Technical%20Coordination%20Meeting%20(26/04/2024).).

⁹⁹ Admin Web Papua, "Indonesia–Papua Nugini Sepakati Penguatan Transportasi Lintas Batas," Website resmi Provinsi Papua, 2025, <https://papua.go.id/view-detail-berita-9449/indonesiapapua-nugini-sepakati-penguatan-transportasi-lintas-batas.html#:~:text=Jayapura> — Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini, Standar Operasional Prosedur (sop) transportasi lintas batas.

nadi ekonomi yang menghidupkan pasar-pasar perbatasan dan zona ekonomi khusus yang sedang direncanakan. Dengan keterlibatan BUMN Indonesia dalam proyek fisik di wilayah Papua Nugini, perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan fungsi ekonomi lintas batas yang memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan utama di Pasifik. Selain aspek konstruksi, kerja sama ini juga mencakup transfer pengetahuan dan pemeliharaan infrastruktur jangka panjang, yang memastikan bahwa konektivitas dari perbatasan Wutung ke Vanimo tetap terjaga sebagai jalur perdagangan yang efisien. Keberhasilan BUMN konstruksi sebagai pemain multinasional di wilayah ini menjadi bukti nyata kontribusi sektor bisnis Indonesia dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran bersama di garis perbatasan negara.¹⁰⁰ Studi kasus ini jika dilihat dari kacamata *Multiple Channels* seluruh aktornya memiliki bekerja sama sesuai porsi masing-masing dalam pengelolaan perbatasan walaupun beberapa MNC yang berperan dalam kerja sama diperbatasan Indonesia dan Papua Nugini tidak hanya berfokus ke keamanan akan tetapi salah satu pemicu adanya masalah-masalah yang terjadi karena kurangnya fasilitas, kurangnya akomodasi transportasi dan tidak sejahteranya masyarakat disekitar perbatasan. Jadi salah satu pemicunya masalah-masalah yang terjadi bukan hanya karena lemahnya keamanan disekitar perbatasan saja.

3.1.3 Peran Korporasi dan Lembaga Keuangan Internasional

¹⁰⁰ Bina Administrasi Kewilayahan, "Ditjen Bina Adwil Kokohkan Kerjasama Perbatasan RI – PNG Tahun 2024."

Peran Lembaga Keuangan Internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*), bertindak sebagai saluran lintas-pemerintah dan transnasional yang penting. Keduanya memfasilitasi aliran modal, memberikan pinjaman, dan menetapkan kondisi (kondisionalitas) yang harus dipatuhi negara-negara penerima. Hal ini menghubungkan kebijakan ekonomi negara-negara dan memengaruhi stabilitas keuangan global. Akan tetapi hingga saat ini belum ada lembaga keuangan internasional yang membiayai atau memberi modal dalam menciptakan saluran hubungan kerja sama perbatasan di wilayah Muara Tami.

3.1.4 Peran Aktor Yang Menembus Batas Negara

Masyarakat adat menjadi salah satu aktor yang kerap melakukan perpindahan wilayah dengan menembus batas negara, masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini memiliki kohesi etnis yang mendalam, dengan bahasa dan adat istiadat yang serupa. Kohesi ini memfasilitasi interaksi sosial yang intensif dan berlangsung secara turun-temurun, mencakup pertukaran hasil pertanian, upacara adat, hingga kunjungan keluarga. Di sisi lain, kedekatan budaya dan akses melalui jalur tradisional juga memicu tantangan keamanan non-tradisional. Aturan resmi negara kerap membatasi mobilitas, namun ikatan kekerabatan yang kuat memfasilitasi pelintas batas tanpa dokumen atau migrasi ilegal.¹⁰¹

"Kalau lembaga swadaya masyarakat, paling kita biasa kalau ada masalah-masalah mungkin kita

¹⁰¹ Reza Kusuma Wardana, "Kepentingan Nasional Amerika Serikat Di Kawasan Ri-Png Melalui Pembangunan," *Diplomacy And Global Security Journal* 2, no. 2 (2025): 345–60, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4594>.

berkoordinasi dengan Ondoafi-ondoafi yang ada di perbatasan. Tapi untuk eh hitam di atas putih tidak ada, tidak ada perjanjiannya itu. Iya, ikut hadir. Biasa kita dalam rapat-rapat diundang bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada."

Menurut data wawancara melalui virtual *online* oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, menjelaskan bahwa masyarakat atau ketua adat yang tinggal di wilayah perbatasan biasanya dipanggil untuk berkoordinasi terkait masalah-masalah perbatasan yang terjadi.

3.2 Hubungan Konsep *Border Management* antara Indonesia dan Papua

Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Konsep ini berhubungan dengan isu perbatasan yang terjadi di Muara Tami karena konsep ini dapat menjelaskan bagaimana *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation*, *Administration* diterapkan di PLBN Skouw dalam menangani isu yang ada. Dengan adanya empat pembagian pengelolaan perbatasan, keempatnya akan dijelaskan secara rinci dibawah ini :

3.2.1 Penerapan *Allocation* dalam konsep *Border Management* studi kasus perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Dasar utama alokasi wilayah Indonesia dan Papua Nugini seperti halnya banyak batas negara pasca kolonial, yaitu terletak pada prinsip *Uti Possidetis Juris* (UPJ). Prinsip ini merupakan aturan umum hukum internasional yang mewajibkan negara-negara baru yang muncul melalui suksesi negara untuk menghormati batas-batas administrasi atau teritorial yang telah ada pada masa kolonial. Dalam kasus Indonesia dan Papua Nugini, ini berarti kedua negara

mewarisi batas yang telah ditetapkan antara kekuasaan kolonial Belanda di Barat dan kekuasaan Inggris, Jerman, dan kemudian Australia di Timur.¹⁰²

Penerapan UPJ ini menjamin stabilitas batas pascakolonial, mencegah klaim teritorial yang mungkin timbul dari alasan berbasis etnis atau geografis yang tidak sesuai dengan warisan administrasi kolonial. Bagi Indonesia, prinsip ini membenarkan kontinuitas batas yang ditetapkan oleh Hindia Belanda.¹⁰³

Sejarah batas RI–PNG berakar kuat pada klaim kolonial abad ke-19. Klaim pertama Belanda pada tahun 1828 secara samar mendefinisikan wilayahnya di New Guinea, dengan patokan yang ditetapkan secara luas pada meridian 141° Bujur Timur (BT). Pada tahun 1848, dekret Belanda memperluas kekuasaan Sultan Tidore, yang secara efektif menjadi protektorat Belanda, ke seluruh wilayah yang terbentang antara meridian 141° BT di selatan dan Tanjung Djar (Cap Bonpland) di utara. Perkembangan geopolitik di wilayah timur Irian Jaya terjadi pada tahun 1884, ketika Britania Raya mendeklarasikan protektorat di sepanjang pantai selatan New Guinea (timur batas Belanda), dan Jerman menganeksasi pantai utara, juga di sebelah timur batas klaim Belanda. Perluasan klaim ini secara langsung memicu kebutuhan untuk mendefinisikan garis pemisah yang permanen.¹⁰⁴

¹⁰² Saru Arifin, “Pelaksanaan Asas Utī Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 183–204, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art2>.

¹⁰³ Wolfgang Friedmann, “Masalah Hukum Di Celah Timor Antara Timor-Leste Dengan Australia – Telaah Dari Aspek Perlindungan Kepentingan Hukum,” *Universitas Kristen Satya Wacana*, 2008, <https://repository.uksw.edu/server/api/core/bitstreams/da3cd6d4-b52d-4012-bd31-4eae7d467796/content>.

¹⁰⁴ Office of the Geographer, “International Boundary Study No. 160: Indonesia-Papua New Guinea Boundary,” no. 160 (1977): 1.

Mekanisme alokasi batas RI-PNG mencapai puncaknya pada Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, yang ditandatangani pada 12 Februari 1973. Perjanjian ini adalah hasil dari negosiasi intensif pascakolonial, termasuk *Joint-Survey Indonesia-Australia* (Misi Cenderawasih) yang dilakukan antara tahun 1965 dan 1967. Perjanjian 1973 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan semua masalah perbatasan yang belum tuntas. Lingkup perjanjian ini sangat luas, mencakup penetapan garis batas darat, batas laut wilayah (*territorial sea*), dan batas dasar laut (*seabed boundary*) di bagian selatan Pulau Papua.¹⁰⁵

3.2.2 Penerapan *Delimitation* dalam konsep *Border Management* studi kasus perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami.

Setelah proses *Allocation*, *Delimitation* adalah langkah selanjutnya dalam konsep manajemen perbatasan oleh Stephen B Jones. Secara definisi Delimitasi adalah proses hukum yang digunakan dua negara berdaulat untuk menetapkan dan menjelaskan secara tertulis lokasi batas bersama mereka, terutama sebagai hasil dari pengambilan keputusan di meja perundingan.¹⁰⁶ Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini yang membentang di Pulau New Guinea (sebelumnya Irian) memiliki akar historis dalam tahap *Allocation* kolonial. Garis batas ini awalnya merupakan hasil perjanjian politik antara bekas penguasa kolonial Hindia Belanda (Indonesia)

¹⁰⁵ UUD 1973, "Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea," *https://Peraturan.Bpk.Go.Id/* 21, no. July (1973): 1154–57, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47434/uu-no-6-tahun-1973>.

¹⁰⁶ Dewa Gede Sudika Mangku, "Legal Implementation on Land Border Management Between Indonesia and Papua New Guinea According To Stephen B. Jones Theory," *Veteran Law Review* 1, no. 1 (2018): 72–86.

dan koloni Jerman/Australia (PNG). Setelah Indonesia dan Papua Nugini (melalui Australia) mencapai kedaulatan, mereka mewarisi dan mengesahkan kembali garis tersebut. Proses pengesahan ulang ini sangat penting, garis yang awalnya dipaksakan dari luar pada masa Allocation kolonial, harus secara aktif dikonfirmasi oleh negara-negara merdeka melalui Delimitasi untuk memperoleh legitimasi kedaulatan nasional.¹⁰⁷

Dasar yuridis untuk menetapkan batas Indonesia-Papua Nugini dimulai dengan deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 mengenai batas antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Deklarasi ini menegaskan penentuan batas-batas dari tiga kekuatan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah tersebut. Dengan deklarasi ini, Papua Barat diratifikasi sebagai milik Belanda dan tidak perlu menunggu pengakuan dari siapa pun.

Kemudian setelah itu, ada beberapa dasar hukum, yaitu: Konvensi antara Inggris dan Belanda pada 16 Mei 1895 mengenai penentuan garis batas antara Irian dan Papua Nugini, Akurasi pengamatan dan penelusuran kegiatan lapangan antara Indonesia-Australia pada 4 Agustus 1964, kegiatan tahun 1966/1967, Perjanjian antara Pemerintah Indonesia-Pemerintah Persemakmuran Australia mengenai penetapan batas dasar laut tertentu, yang ditandatangani di Canberra pada 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun 1971, Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Mangku.

¹⁰⁸ Mangku.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas namanya sendiri dan atas nama pemerintah Papua Nugini) mengenai pengaturan administratif mengenai batas antara Indonesia-Papua Nugini yang ditandatangani di Port Moresby pada 13 November 1973 dan disahkan dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1974 kemudian digantikan dengan perjanjian dasar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai pengaturan batas yang ditandatangani di Jakarta pada 17 Desember 1979 yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 6 tahun 1980, kemudian diperbarui di Port Moresby pada 29 Oktober 1984, dan diratifikasi oleh Keputusan Presiden No.66 tahun 1984, yang kemudian diperbarui di Port Moresby pada 11 April 1990 dan disetujui oleh Keputusan Presiden No.39 tahun 1990.¹⁰⁹

3.2.3 Penerapan *Demarcation* dalam konsep *Border Management* studi kasus perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami.

Demarcation merupakan tahap ketiga yang oleh Stephen B Jones diartikan sebagai proses mekanis untuk mewujudkan batas yang telah didelimitasi secara hukum menjadi batas fisik di lapangan (*on the ground*). Proses demarkasi melibatkan pekerjaan teknis yang dilakukan oleh insinyur dan surveyor, di mana penanda fisik, seperti pilar, patok, atau *beacons*, didirikan, dinomori, dan dicatat pada peta resmi. Demarkasi mengubah garis batas deskriptif menjadi batas *de facto* yang dapat dilihat dan Jones mengakui bahwa proses mekanis ini bertujuan menciptakan batas yang jelas.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mangku.

¹¹⁰Dennis Rushworth, "Mapping in Support of Frontier Arbitration : Delimitation and Demarcation," 1997, 61–64, <https://www.durham.ac.uk/media/durham-university/research-/research-centres/ibru->

Demarkasi batas darat Indonesia dan Papua Nugini telah berlangsung sejak tahun 1966. Berdasarkan perjanjian yang diratifikasi, total terdapat 55 Tugu Utama (*Main Monuments* - MM) dan sebanyak 1792 Patok Perapatan (*Subsidiary Markers*) yang tersebar di sepanjang garis batas. Di wilayah Muara Tami, Kota Jayapura, salah satu patok utama yang sering menjadi titik referensi pengawasan adalah Patok MM 2. Kepadatan Patok Perapatan yang mencapai 1792 buah adalah komitmen untuk mengatasi kompleksitas topografi dan memastikan *visibilitas* batas yang tinggi di wilayah hutan lebat. Kuantitas ini menunjukkan bahwa tahap Demarkasi menuntut investasi teknis dan logistik yang sangat besar, sebuah prasyarat yang secara inheren akan meningkatkan beban kerja pada tahap Administrasi.¹¹¹

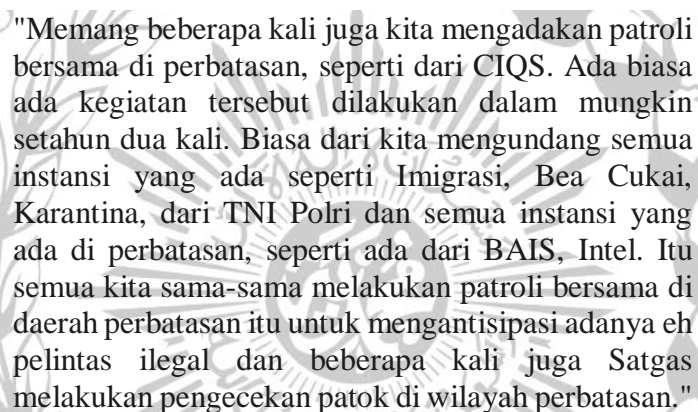
Proses pemasangan patok harus mengikuti prosedur survei geodesi presisi tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa koordinat digital dan tanda fisik di lapangan tidak bertentangan, yang dapat menyebabkan masalah saat penegasan batas harus dipindahkan secara praktis ke tanah selamapun detail teknisnya bersifat proprietary, peran aktif Badan Informasi Geospasial dan Topografi Militer Kodam dalam mengawal patroli dan rencana pembangunan pilar baru menegaskan bahwa proses pemasangan harus mematuhi standar geodetik internasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa koordinat digital dan tanda fisik di lapangan tidak

centre-for-borders-research/maps-and-databases/publications-database/boundary-amp-security-bulletins/bsb5-1_rushworth.pdf.

¹¹¹ Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, "Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan," 2014, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/pdf/682610WP0P11840order0Areas0201102014.pdf>.

bertentangan, yang dapat menyebabkan masalah saat penegasan batas harus dipindahkan secara praktis ke tanah selama implementasi.¹¹²

Selain pemasangan patok, demarkasi di Muara Tami juga dilakukan kegiatan patroli rutin oleh beberapa petugas PLBN Skouw yaitu BNPP, Imigrasi, Bea Cukai dan TNI. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw melalui wawancara *virtual online* dengan penulis.



"Memang beberapa kali juga kita mengadakan patroli bersama di perbatasan, seperti dari CIQS. Ada biasa ada kegiatan tersebut dilakukan dalam mungkin setahun dua kali. Biasa dari kita mengundang semua instansi yang ada seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dari TNI Polri dan semua instansi yang ada di perbatasan, seperti ada dari BAIS, Intel. Itu semua kita sama-sama melakukan patroli bersama di daerah perbatasan itu untuk mengantisipasi adanya eh pelintas ilegal dan beberapa kali juga Satgas melakukan pengecekan patok di wilayah perbatasan."

Meskipun JTSC memegang mandat teknis untuk survei dan pemetaan, tugas operasional pemeliharaan fisik dan pengawasan harian patok batas di lapangan didelegasikan kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI. Tanggung jawab Satgas Pamtas tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi secara eksplisit mencakup pengawasan dan perawatan patok batas negara agar terhindar dari pergeseran atau kerusakan.¹¹³

¹¹² Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.35586/v5i1.316>.

¹¹³ Admin TNI AD, "Jaga Stabilitas Keamanan, Satgas Yonif 122_TS Pemeriksaan Di Sepanjang Jalan Distrik Muara Tami Papua," *Tni Angkatan Darat*, 2023, <https://tniad.mil.id/311377-2/>.

3.2.4 Penerapan *Administration* dalam konsep *Border Management* studi kasus perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami.

Administration adalah tahap manajemen perbatasan yang menurut Stephen B Jones yang paling kompleks yang mana melibatkan manajemen berkelanjutan dan dinamis terhadap garis batas yang telah ditetapkan secara politik, hukum, dan fisik. Di Muara Tami Skouw, fase ini beroperasi melalui tiga pilar utama yaitu regulasi pergerakan manusia, administrasi kegiatan ekonomi, dan pengelolaan keamanan.¹¹⁴ Pada tahap regulasi pergerakan manusia di PLBN Skouw, administrasi perbatasan Indonesia dan Papua Nugini mengandalkan mekanisme Pas Lintas Batas (PLB). PLB adalah izin khusus yang memungkinkan masyarakat perbatasan (penduduk tradisional) untuk melintasi batas tanpa paspor dalam radius dan waktu terbatas (umumnya berlaku satu tahun). Sistem ini berfungsi sebagai jembatan penting untuk mempertahankan hubungan kekerabatan, adat, bahkan pernikahan yang melampaui garis batas antara warga Wutung Papua Nugini dan Skouw, Indonesia.¹¹⁵

Pengelolaan pergerakan ini dilakukan oleh pihak imigrasi dan bea cukai. Data statistik perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Skouw menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pelintas yang datang dan pergi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini

¹¹⁴ Dewa Gede Sudika M, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (Bnpp) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini Dewa Gede Sudika Mangku."

¹¹⁵ Muchsin and Aedah, "Implementasi Kebijakan Lintas Batas Wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea Di Kabupaten Keerom."

didorong oleh berbagai faktor, termasuk berbelanja kebutuhan pokok, menjenguk kerabat, dan perkawinan antar negara.¹¹⁶

Keberhasilan peningkatan jumlah pelintas yang menggunakan dokumen resmi (PLB) merupakan indikasi keberhasilan administratif dalam *melembagakan* pergerakan informal yang semula tidak teratur. Hal ini membuktikan bahwa ketika sistem administrasi (PLB) dirasakan efisien dan mengakomodasi kebutuhan sosial, masyarakat perbatasan cenderung memilih jalur resmi daripada jalur ilegal, sehingga mengurangi risiko keamanan dan karantina, serta memberikan legitimasi sosial kepada garis batas yang didemarkasi.¹¹⁷

Selain pergerakan migrasi WNA atau WNI di PLBN Skouw, sistem administrasi keamanan dan CIQS. Yang mana pengelolaan dilakukan melalui sinergi antarlembaga (Customs, Immigration, Quarantine, and Security/CIQS) di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tantangan keamanan yang dihadapi bersifat transnasional dan administratif. Ini termasuk penyelundupan komoditas terlarang (seperti bibit ganja dari PNG) dan hewan/tumbuhan ilegal (seperti vanili), serta perusakan fasilitas perbatasan. Patroli gabungan yang melibatkan unsur Karantina serta TNI-Polri secara rutin dilakukan untuk menindak *jalur tikus* dan memulihkan integritas fisik fasilitas yang menjadi bagian dari *Demarcation*.¹¹⁸

¹¹⁶ Muchsin and Aedah.

¹¹⁷ Muchsin and Aedah.

¹¹⁸ Wisnu Widayat Ledyana Hanna Basna, Virra Wirdhiningsih, "Evaluasi Border Control Management Plbn Skouw Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan Dan Keamanan Keimigrasian" 10 (2025): 240–54, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/31453>.

Tantangan kritis dalam administrasi adalah menemukan keseimbangan antara penerapan prosedur pemeriksaan yang efisien untuk memfasilitasi perdagangan legal, sambil tetap menjamin keamanan tanpa kompromi. Meskipun gerakan bersenjata seperti OPM dianggap sudah tidak aktif di wilayah Jayapura, kewaspadaan administratif dan keamanan tetap diperlukan. Deteksi berkelanjutan terhadap aktivitas penyelundupan menunjukkan bahwa, meskipun garis batas formal berhasil mengatur pergerakan resmi, insentif ekonomi yang ditawarkan oleh jalur ilegal masih cukup besar untuk menarik pelaku kejahatan. Administrasi harus terus beradaptasi dan menutup celah-celah ini untuk mempertahankan integritas tata kelola perbatasan yang telah dibangun.¹¹⁹

3.3 *Multiple Channels* Sebagai Dasar Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini

Dalam teori *Complex Interdependency*, variabel *mutliple channels* yang dijelaskan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Keduanya menjelaskan bahwa aktor dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu yang pertama Interstate yang menjelaskan bahwa kerja sama dijalin oleh hubungan formal antar negara contohnya seperti melalui diplomasi antar kementerian luar negeri, perjanjian bilateral, atau negosiasi antar kepala negara. Yang kedua transgovernmental yang menjelaskan hubungan langsung antar lembaga pemerintah lintas negara, yang tidak selalu terkoordinasi penuh oleh Kementerian Luar Negeri, contohnya adalah pertemuan rapat antara pemerintah daerah Jayapura dan Vanimo untuk membahas keberlangsungan kerja sama perbatasan. dan yang terakhir transnational yang mana

¹¹⁹ Ledyana Hanna Basna, Virra Wirdhiningsih.

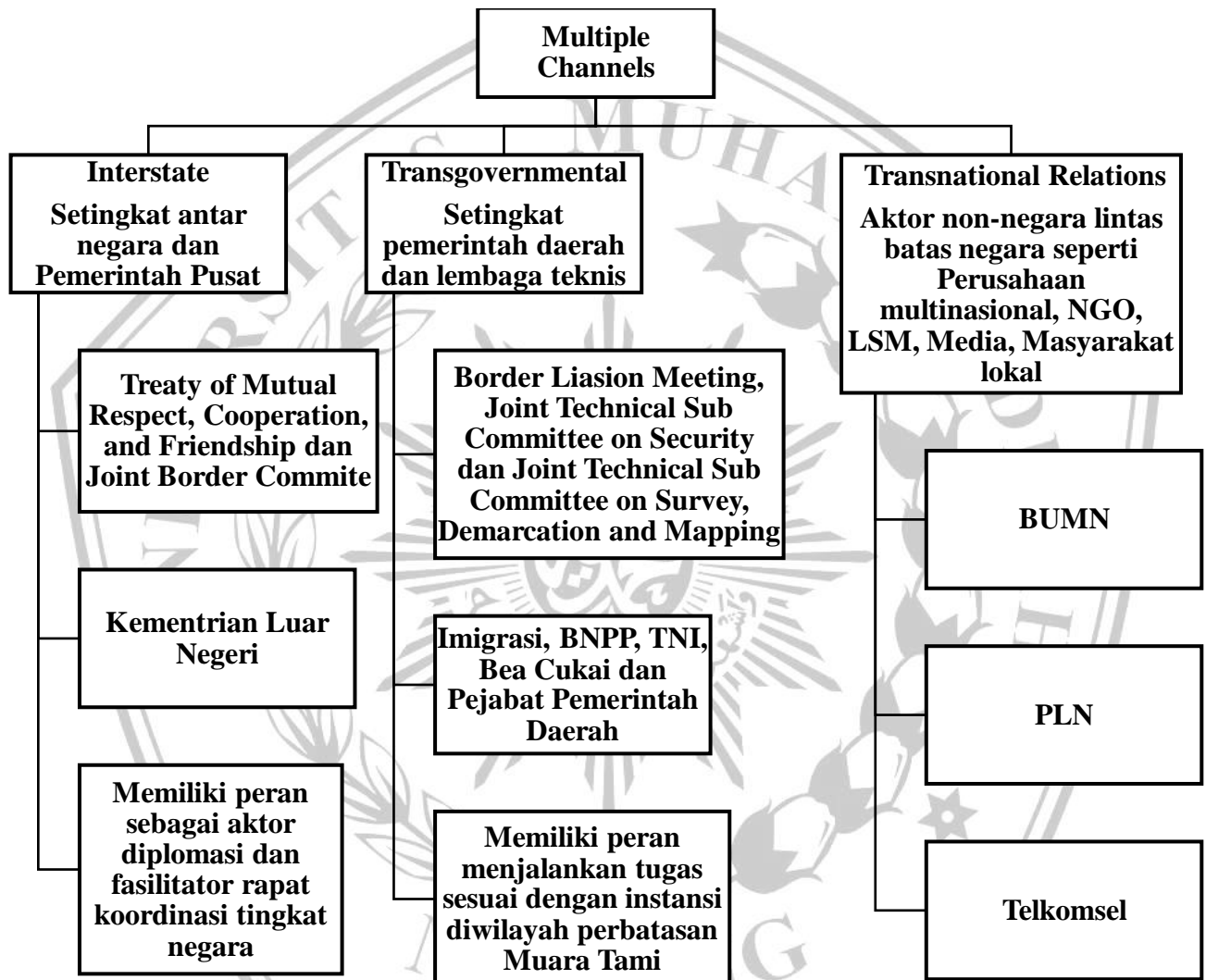
menjelaskan bahwa hubungan kerja sama terdiri antar aktor non-negara lintas batas negara seperti perusahaan multinasional, NGO, LSM, Media, Masyarakat lokal. contohnya adalah warga PNG sering berbelanja kebutuhan pokok di pasar Skouw, Papua. Ini menciptakan interdependensi ekonomi lokal meskipun tidak selalu legal-formal. Dengan begitu ketiga saluran channel tersebut dapat diringkas menjadi hubungan antar negara, hubungan antar pemerintah dan hubungan transnasional.¹²⁰



¹²⁰ Robert O. Keohane and Nye, *Power and Interpedence*.

Selanjutnya penulis akan memberikan rincian apa saja aktor, perannya, dan kontribusi yang terlibat dalam kerja sama perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini berdasarkan variabel *multiple channels* dalam melihat kerja sama

Tabel 3. 1 Multiple Channels Dalam Membedakan Tingkatan Aktor



Sumber : tabel dibuat dan diolah sendiri oleh penulis

3.4 Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Department of Foreign Affairs of Papua New Guinea sebagai aktor Interstate dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Aktor antar negara yang ada dalam kerja sama perbatasan Indonesia dan Papua Nugini adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Papua Nugini yang dikenal dengan nama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), keduanya menjadi aktor yang mendasari hubungan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam perjanjian *Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship*. Peran kemenlu kedua negara dalam kerja sama perbatasan adalah memimpin forum diplomatik desmi dan melakukan pertemuan rutin untuk merealisasikan kerja sama perbatasan seperti forum *Joint Border Commitee*.¹²¹ Selain sebagai fasilitator pertemuan rapat, pemerintah pusat atau kemenlu juga bertindak sebagai koordinator antar instansi (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BNPP, pemerintah daerah) dalam kerja sama dengan Papua Nugini dengan begitu Kemenlu memastikan bahwa kebijakan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya perbatasan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi sinkron dengan kesepakatan bilateral.¹²²

Kontribusi yang diberikan oleh rapat pertemuan yang dilakukan oleh kemenlu kedua negara adalah memberikan dan memperkuat konektivitas kerja sama kedua negara di wilayah perbatasan seperti pertemuan yang dilakukan oleh

¹²¹ Bina Administrasi Kewilayahan, "Sidang JBC Ke-38 Jadi Upaya Bersama RI-PNG Untuk Kemajuan Kawasan Perbatasan."

¹²² Admin Bnpp, "Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Fasilitasi Delegasi Departemen Pertanian Papua Nugini," Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (bnpp RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-dan-kri-vanimo-matangkan-rencana-kontinjensi-wni-di-wilayah-rawan-papua-nugini>.

Menlu Retno Marsudi dan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko di Jayapura, Rabu 8 Mei 2024 yang membahas mengenai komitmen Indonesia dan Papua Nugini harus membawa manfaat bersama dan membawa kesejahteraan bagi kedua bangsa, termasuk masyarakat yang tinggal di perbatasan negara.¹²³

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Papua New Guinea Kemlu bertindak sebagai koordinator diplomatik untuk semua isu bilateral yang berkaitan dengan perbatasan RI-Papua Nugini dan menjadi partisipasi forum tingkat tinggi seperti Joint Border Commite yang mana dalam rapat terssebut dilakukan pembahasan untuk segera membentuk Technical Working Group guna membahas peninjauan ulang terkait Basic Agreement 2013 dan Special Arrangements 1993, terutama untuk membahas materi serta menerima masukan dari berbagai sektor lintas Kementerian/Lembaga. Selain itu ditekankan juga perlunya koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah selaku pengguna langsung di lapangan. Peninjauan ulang terhadap Basic Agreement 2013 dan Special Arrangements 1993 merupakan amanat dari Pertemuan Joint Border Committee (JBC) RI – PNG Ke-37 Tahun 2023 di Port Moresby, Papua Nugini.¹²⁴

"Pertemuan sering dilakukan dengan eh pemerintah Papua Nugini, khususnya difasilitasi oleh Provinsi Papua. Itu ada namanya rapat BLOM, BLM, dan JBC. Kalau BLOM itu, itu mengambil isu-isu yang terjadi di perbatasan dari para petugas, memberikan masukan sehingga dibawa ke rapat BLM, Border Liaison Meeting. Itu tingkat eh provinsi. Dan setelah selesai di atas tingkat provinsi, hasilnya akan ditentukan di JBC. JBC itu berarti itu tingkat eh

¹²³ Fajar Nugraha, "RI-PNG Sepakat Dorong Kerja Sama Memperkuat Konektivitas Di Wilayah Perbatasan," Metro TV, 2024, https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5yaM-ri-png-sepakat-dorong-kerja-sama-memperkuat-konektivitas-di-wilayah-perbatasan?utm_source.

¹²⁴ Bina Administrasi Kewilayahan, "Ditjen Bina Adwil Kokohkan Kerjasama Perbatasan RI – PNG Tahun 2024."

kepala negara. Nah, itu nanti dituangkan di dalam perjanjian kenegaraan, apa saja yang kita harus eh, masalah-masalah apa yang kita harus selesaikan sehingga tetap pelayanan tetap jalan di PLBN begitu."

Menurut data wawancara melalui virtual online oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, menjelaskan bahwa rapat forum yang digelar oleh kementerian luar negeri Indonesia dan Papua Nugini berjalan setiap satu tahun sekali yang pembahasan rapat tersebut diangkat dari masalah-masalah lapangan yang diteruskan dari forum Border Liasion Meeting ke forum Joint Border Committe.

Gambar 3. 1 Forum Rapat Antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Papua New Guinea



Sumber : Web Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-kokohkan-kerjasama-perbatasan-ri--png-tahun-2024>

3.5 Peran Imigrasi Jayapura sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Kewenangan Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura diperbatasan wilayah Muara Tami adalah menjalankan fungsi vital sebagai bagian integral dari sistem CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) di PLBN Skouw. Wewenang utama Imigrasi meliputi pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang ditangani bervariasi, mulai dari masalah administratif seperti *overstay* dan penggunaan dokumen palsu, hingga pelanggaran pidana serius seperti masuk secara ilegal (*illegal entry*) dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal yang selanjutnya akan dideportasi ke negara asal. Komitmen Imigrasi untuk menjaga kedaulatan perbatasan dan menindak tegas pelanggaran telah berulang kali ditekankan oleh otoritas Imigrasi.¹²⁵

"I-nya itu Imigrasi, Q-nya itu Karantina, dan S-nya itu ada Security, ada TNI Polri. Nah, jadi kami di PLBN Skouw itu fasilitasnya itu BNPP. Nah, di dalam gedung PLBN itu, ada imigrasi. Imigrasi itu berarti menyangkut orangnya. Jadi orang yang masuk ke luar wilayah Indonesia itu berarti itu melalui imigrasi. Dan barang bawaan yang dibawa sama mereka itu nanti diperiksa melalui Bea Cukai. Nah, terus karantina itu ada karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu berarti kalau ada orang sakit dari luar mau masuk ke Indonesia itu harus melalui karantina kesehatan dulu. Terus kalau karantina pertanian, karantina pertanian itu berarti dia kalau dia membawa hasil pertanian yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia berarti itu melalui karantina pertanian. Nah, jadi imigrasi itu hanya orangnya dan

¹²⁵ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, "Imigrasi Jayapura Deportasi 69 WNA Selama 2020," Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, 2021, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/01/19/imigrasi-jayapura-deportasi-69-wna-selama-2020>.

dokumennya. Tapi kalau barang bawaannya, itu melalui Bea Cukai dan Karantina."

Menurut data wawancara melalui virtual online oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, Beliau menjelaskan bahwasannya ada beberapa intasni yang bekerja sama digedung PLBN Skouw dalam rangka melayani WNI atau WNA yang melakukan perpindahan dari Indonesia ataupun sebaliknya dari Papua Nugini.

Kerja sama Imigrasi dan Konsulat Papua Nugini di Jayapura adalah Konsulat Jenderal ini berfungsi sebagai mitra komunikasi diplomatik langsung dan vital bagi Imigrasi Jayapura. Konsulat terlibat langsung dalam proses verifikasi, penjaminan, dan repatriasi warga negara Papua Nugini yang melanggar hukum keimigrasian di Indonesia.¹²⁶ Selain itu adanya pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja yang mana tim verifikasi dari Papua Nugini yang dipimpin oleh Konsul Jenderal PNG di Jayapura dengan anggota dari Imigrasi dan Departemen Pertahanan Papua Nugini secara berkala mengunjungi titik-titik perbatasan di wilayah Indonesia, seperti Merauke, PLBN Skouw dan PLBN Sota untuk verifikasi lapangan dan konsultasi.¹²⁷

Adapun data kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura bagian intelijen dan penindakan keimigrasian pada tahun 2025 berdasarkan laporan kerja bulanan sebagai berikut :

¹²⁶ Admin Bnpp, "PLBN Skouw Fasilitasi Deportasi Tiga WNA Papua Nugini Yang Langgar Izin Masuk Wilayah Indonesia," Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (bnpp RI), 2025, <https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-fasilitasi-deportasi-tiga-wna-papua-nugini-yang-langgar-izin-masuk-wilayah-indonesia>.

¹²⁷ KRI Vanimo, "Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan Republik Indonesia Konsulat Republik Indonesia Dan Vanimo," 2025, https://kemlu.go.id/files/repositori/77884/174727072168253c413c470_LKJ_KRI_Vanimo_2024_2_.pdf.

Tabel 3. 2 Tabel Data Laporan Kerja Kanim Kelas 1 TPI Jayapura

Tanggal	Operasi Gabungan	Operasi Intelijen	Operasi Mandiri	Pendentensian	Pencekalan	Deportasi	Penyerahan Ke Rudenim
Januari	-	5	2	-	-	1	2
Februari	-	1	1	20	8	10	8
Maret	-	-	-	8	13	13	-
April	-	1	-	-	-	2	-
Mei	3	-	-	-	-	24	-
Juni	-	-	-	-	-	17	-
Juli	-	4	-	-	-	5	-
Agustus	1	4	3	-	-	-	-

Sumber : Tabel diolah sendiri oleh penulis berdasarkan data postingan instagram @kanim.jayapura

Berdasarkan pada tabel tersebut peran Imigrasi yang menjadi salah satu aktor transgovernmental yang menjadi klasifikasi variabel *Multiple Channels* turut andil dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami, selain itu imigrasi juga Imigrasi Jayapura bertanggung jawab memfasilitasi pergerakan warga di perbatasan sekaligus memastikan keamanan. Salah satu mekanisme utamanya adalah penerbitan Pas Lintas Batas Tradisional (PLBT). PLBT, yang diterbitkan oleh Imigrasi Jayapura dengan warna merah, berfungsi sebagai dokumen pengganti

paspor bagi warga negara Indonesia yang memiliki ikatan kekerabatan atau adat dengan penduduk di wilayah perbatasan Papua Nugini.¹²⁸

Berdasarkan data wawancara, Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw menjelaskan bahwa data dari tahun 2023-2025 ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan oleh Kanim Imigrasi Jayapura.

"Kalau saya punya datanya ini hanya dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Jadi, pada tahun 2023, Imigrasi Indonesia berhasil mendeportasi sekitar 56 orang. Itu ada yang dari kasus ilegal entry dan ada juga kasus dari penyelundupan ganja jenis eh, narkoba jenis ganja. Terus tahun 2024, imigrasi berhasil mendeportasi 75 orang dengan kasus yang sama dan tahun 2025 67 orang dengan kasus yang sama yaitu ilegal entry dan eh, penyelundupan narkoba jenis ganja."

Beliau menjelaskan bahwa data 2023-2025 seluruh pelaku diberlakukan deportasi yang mana Deportasi yang sudah selesai menjalani masa tahanan di ada yang di Lembaga Pemasyarakatan Abepura dan ada di Lembaga Pemasyarakatan Doyo, yaitu khusus narkoba.

Untuk pencegahan aktivitas kriminal seperti *illegal migration* dan penyebaran penyelundupan narkoba melalui jalan tikus atau jalur tidak resmi di wilayah Muara Tami, Imigrasi memiliki pos lintas batas negara dan pos lintas batas tradisional yang berada di beberapa titik di wilayah Muara Tami yaitu :

1. Pos Lintas Batas Negara (PLBN Skouw) Skouw
2. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Waris

¹²⁸ Antara News, "Kantor Imigrasi Jayapura Terbitkan 386 Kartu Lintas Batas Tradisional," 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4957201/kantor-imigrasi-jayapura-terbitkan-386-kartu-lintas-batas-tradisional>.

3. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Senggi
4. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Skofro
5. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Yuruf
6. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Yeti
7. Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Ubrup
9. Pos Lintas Batas Laut (PLBTL) Hamadi

Pos-pos tersebut dijaga oleh petugas Imigrasi bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) untuk penegakan hukum dan memfasilitasi setiap kegiatan keimigrasian termasuk proses deportasi untuk memastikan semua prosedur berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, petugas Imigrasi di PLBN Skouw bertugas memeriksa dua kategori pelintas pelintas tradisional yang menggunakan Pas Lintas Batas dan pelintas model yang menggunakan Paspor.¹²⁹

"Jadi memang kita tidak bisa pungkiri karena memang kan di daerah itu kan banyak sekali jalur-jalur yang bisa dilewati pelintas dan petugas kita di sana juga kan terbatas. Nah, jadi sampai saat ini petugas kami hanya bisa menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa jika ingin masuk ke wilayah Indonesia harus melalui tempat yang sudah ditentukan. Tapi kenyataannya di lapangan juga memang karena dengan banyaknya jalur-jalur tersebut, jadi sampai saat ini belum eh maksimal untuk kita lakukan pengamanan atau pengawasan di sana."

Komitmen Imigrasi dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang ada karena wilayah Muara Tami cukup luas maka dengan adanya pos-pos diatas menjadikan salah satu instrumen penting dalam pengamanan dan pengawasan sehingga pengawasan di pos-pos tradisional tersebut belum cukup maksimal karena masih

¹²⁹ Bnpp, "plbn Skouw Fasilitas Deportasi Tiga WNA Papua Nugini Yang Langgar Izin Masuk Wilayah Indonesia."

menggunakan sistem manual dan belum seperti di Skouw sudah pakai sistem online seperti di perbatasan-perbatasan besar lainnya.

"Kalau terkait penyebaran narkoba, ada beberapa kali juga dari teman kita dari kepolisian, TNI, sama Bea Cukai. Kalau terkait barang itu kan itu ranahnya Bea Cukai. Nah, memang ada beberapa kali kita penangkapan eh seperti ganja di perbatasan juga. Ada beberapa yang masuk melalui jalur resmi dan ada juga beberapa yang melalui jalur ilegal."

Menurut data wawancara melalui virtual online oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, petugas Imigrasi ikut andil dalam penangkapan penyebaran narkoba di wilayah Muara Tami Khususnya di PLBN Skouw bersama beberapa instansi seperti Bea Cukai dan TNI. Selanjutnya beliau menjelaskan mekanisme deportasi WNI dan WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan Muara Tami.

"Kalau di deportasi, warga negara asing yang mau di deportasi, maksudnya warga negara asing itu, warga negara Papua Nugini yang akan dipulangkan ke negaranya, berarti dia harus dilihat dulu apakah hukum yang seperti dia melakukan tindakan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa hukumannya, hukumannya. Kita akan berkoordinasi dengan konsulat Papua Nugini yang ada di Jayapura. Nah, setelah berkoordinasi, nanti dari Konsulat Papua Nugini akan membuatkan dokumen perjalanan sementara untuk digunakan kembali ke negaranya. Sedangkan jika warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia, yang ditahan di Papua Nugini, itu dari imigrasi atau petugas yang ada di Papua Nugini akan berkoordinasi dengan kedutaan kita yang ada di Papua Nugini dan akan membuatkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP digunakan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Jadi, intinya kita semua ada komunikasi dengan instansi yang terkait."

Beberapa prosedur tersebut yang dijalankan oleh petugas Imigrasi di PLBN Skouw untuk menindaklanjuti WNA atau WNI yang terlibat dalam kasus yang bermacam-macam mulai dari izin tinggal yang kadaluarsa, penyebaran narkoba dan masalah lainnya.

Gambar 3. 2 Deportasi WNI oleh KRI Vanimo dan Petugas Imigrasi TPI I Jayapura



Sumber foto : Laporan Kerja KRI Vanimo
https://kemlu.go.id/files/repositori/77884/174727072168253c413c470_LKJ_KRI_Vanimo_2024_2_.pdf

3.6 Peran BNPP sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

BNPP sebagai aktor transgovernmental dalam klasifikasi *Multiple Channles* memainkan peran penting sebagai salah satu pilar delegasi Indonesia dalam mekanisme kerja sama bilateral dengan Papua Nugini , terutama melalui forum-forum perbatasan formal. BNPP merupakan bagian integral dari delegasi Indonesia

dalam pertemuan Joint Border Committee, forum tingkat tinggi yang membahas urusan batas negara. Sebagai contoh, pada Pertemuan JBC ke-38 yang diselenggarakan pada Desember 2024, BNPP mengutus delegasinya yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dan Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara). Kehadiran delegasi BNPP menunjukkan perannya sebagai penghubung teknis utama yang menjembatani kebijakan batas negara (demarkasi dan keamanan) dengan administrasi lintas batas harian. Tugas BNPP dalam forum ini adalah memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan, termasuk evaluasi pengaturan lintas batas tradisional dan laporan teknis, dapat diimplementasikan di lapangan sebagai komitmen bersama kedua negara.¹³⁰

Di bawah JBC, terdapat forum operasional Border Liaison Meeting (BLM) yang diselenggarakan di tingkat provinsi atau kabupaten. BNPP bertugas mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil yang disepakati dalam BLM, seperti yang terkait dengan Laporan Tahunan Border Liaison Meeting, yang salah satunya membahas hasil Sidang BLM ke-18 pada tahun 2024 di Kabupaten Merauke. Selain itu, BNPP juga terlibat dalam pembahasan laporan Joint Sub-Committee (JSC-SM) yang fokus pada urusan keamanan dan Joint Technical Sub-Committee (JTSC) yang fokus pada survei, demarkasi, dan pemetaan di area perbatasan.¹³¹

PLBN Skouw, yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, merupakan salah satu dari 15 PLBN modern yang dibangun oleh BNPP dan

¹³⁰ Admin bnpp, “perkuat delegasi indonesia, bnpp utus perwakilan pada pertemuan jbc ke-38 di jakarta,” badan nasional pengelola perbatasan republik indonesia (bnpp ri), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/perkuat-delegasi-indonesia-bnpp-utus-perwakilan-pada-pertemuan-jbc-ke38-di-jakarta>.

¹³¹ bnpp.

menjadi unit pelaksana teknis dalam memfasilitasi Indonesia dan Papua Nugini dalam kegiatan Imigrasi. Pembangunan Tahap I PLBN Skouw telah rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2017, menandai perubahan wajah perbatasan. Untuk memastikan optimalisasi fasilitas, BNPP juga mengawal proses tertib administrasi pengelolaan aset. Pada tahun 2023 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyerahkan hibah bangunan PLBN Skouw kepada BNPP RI (Kemendagri), sebuah langkah penting untuk mempermudah kolaborasi lebih lanjut dan pengembangan ekonomi di kawasan

Gambar 3. 3 PLBN Skouw gagalkan WNA asal Papua Nugini yang menyelundupkan 68,13 gram Ganja



tersebut.¹³²

Sumber : website BNPP.go.id

<https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-gagalkan-wna-asal-png-yang-nekat-selundupkan-6813-gram-ganja>

¹³² Admin Web Papua, "Serah Terima Aset Selesai, PLBN Skouw Siap Dioptimalkan," Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua, 2025, <https://papua.go.id/view-detail-berita-9173/serah-terima-aset-selesai-plbn-skouw-siap-dioptimalkan.html>.

Gambar 3. 4 PLBN Skouw Tangkap Pemuda Sorong yang Bawa 8 Gram Biji Ganja dari Papua Nugini



Sumber : website BNPP.go.id
<https://www.gebrak.id/2025/07/plbn-skouw-tangkap-pemuda-asal-sorong.html>
Berdasarkan foto 3.2 dan foto 3.3, Peran BNPP menjadi salah satu yang

mendorong kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam penerapakan kerja sama. Dengan adanya PLBN Skouw yang dibangun oleh BNPP, PLBN Skouw berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja seberat 1.74 kilogram di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami. Selain patroli, BNPP juga memperkuat sinergi kelembagaan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, termasuk membahas penyediaan ruang kerja di PLBN Skouw untuk meningkatkan efektivitas pengawasan narkotika. Razia narkotika gabungan, termasuk pemeriksaan fisik dan tes urine acak, juga rutin dilakukan untuk menjangring penyalahgunaan narkotika di antara pelintas batas dan warga sekitar.¹³³

Selain itu, penerapan fungsi BNPP di PLBN Skouw mencatat volume pergerakan orang yang sangat tinggi, menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi substansial warga Papua Nugini di wilayah Wutung/Vanimmo terhadap Indonesia. Data menunjukkan bahwa dalam satu minggu di bulan September 2025

¹³³ Antonius Nugroho Sudanto, "Patroli Gabungan PLBN Skouw Gagalkan Penyelundupan Ganja Di Jalur Perbatasan RI-PNG," Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (bnpp RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/patroli-gabungan-plbn-skouw-gagalkan-penyelundupan-ganja-di-jalur-perbatasan-ripng>.

(Pekan ke-39), tercatat lebih dari 10.000 pelintas tiba dan 11.000 pelintas berangkat melalui PLBN Skouw. Volume lintas batas yang masif ini menempatkan PLBN Skouw bukan hanya sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai denyut nadi ekonomi regional.¹³⁴

3.7 Peran TNI sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Papua Nugini khususnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, mencerminkan sebuah fungsi Tri-Dharma yang kompleks dan strategis yaitu Pertahanan Kedaulatan, Diplomasi Militer, dan Pembinaan Teritorial Strategis. Melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), TNI tidak hanya menjaga keutuhan wilayah di bawah Kodam XVII/Cenderawasih, tetapi juga secara efektif memerangi ancaman keamanan non-konvensional seperti penyebaran narkoba dan minuman keras ilegal di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.¹³⁵ Selain itu, TNI menjadi pilar stabilitas bilateral dengan PNG Defence Force (PNGDF) melalui Patroli Patok Bersama (PPB).¹³⁶

¹³⁴ Admin bnpp, "Pelaporan Cepat Data Lintas Batas Negara," Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2025, <https://tasbara.bnpp.go.id/>.

¹³⁵ Nandang Hermawan, "TNI Musnahkan Ratusan Miras Ilegal Di Perbatasan," Tni Angkatan Darat, 2018, <https://tniad.mil.id/tni-musnahkan-ratusan-miras-ilegal-di-perbatasan/>.

¹³⁶ Admin WEB TNI, "Bersahabat, TNI AD Dan PNGDF Gelar Patroli Patok Bersama Di Perbatasan RI-PNG," Tentara Nasional Indonesia, 2020, <https://tni.mil.id/view-170866-bersahabat-tni-ad-dan-pngdf-gelar-patroli-patok-bersama-di-perbatasan-ri-png.html>.

Gambar 3. 5 Patroli Patok Bersama TNI AD dan PNGDF di Perbatasan RI-PNG



Sumber : website TNI AD
<https://tni.mil.id/view-170866-bersahabat-tni-ad-dan-pngdf-gelar-patroli-patok-bersama-di-perbatasan-ri-png.html>

Dalam upaya mencegah kejahatan lintas batas dan melindungi keamanan perbatasan, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) adalah unit pelaksana utama TNI AD di Muara Tami, dengan unit yang berotasi seperti Yonif 132/BS, Yonif 122/TS, dan Yonif PR 432 Kostrad. Tugas operasional harian berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang jalan raya Distrik Muara Tami dan di PLBN Skouw. Prajurit secara rutin melaksanakan pemeriksaan (*sweeping*) untuk meninjau dokumen dan barang bawaan yang bertujuan meminimalisir pelanggaran lintas batas dan mencegah masuknya barang ilegal. Selain itu, TNI berperan aktif dalam sosialisasi Peraturan Lintas Batas Negara kepada pemerintah daerah, kepala kampung, Imigrasi, dan Bea Cukai, memastikan masyarakat mengerti aturan resmi sehingga pelanggaran lintas batas dapat diminimalisir.¹³⁷

¹³⁷ AD, "Jaga Stabilitas Keamanan, Satgas Yonif 122_TS Pemeriksaan Di Sepanjang Jalan Distrik Muara Tami Papua."

Patroli perbatasan tersebut dibenarkan oleh Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, beliau menjelaskan bahwa dalam penerapan patroli digelar secara rutin dalam satu tahun ada dua kali penyelenggaraan dan mengundang beberapa instansi dan tidak hanya TNI saja.

"Memang beberapa kali juga kita mengadakan patroli bersama di perbatasan, seperti dari CIQS. Ada biasa ada kegiatan tersebut dilakukan dalam mungkin setahun dua kali. Biasa dari kita mengundang semua instansi yang ada seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dari TNI dan semua instansi yang ada di perbatasan, seperti ada dari BAIS, Intel. Itu semua kita sama-sama melakukan patroli bersama di daerah perbatasan."

Selain itu, TNI secara proaktif menjalin kerja sama bidang pertahanan dan mempererat tali silaturahmi dengan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) sebagai bagian dari *Confidence Building Measures* (CBM) atau diplomasi militer (*Military-to-Military*, M2M). Kunjungan resmi antar komandan, seperti kedatangan Bravo Company Commander PNGDF, Major Adolf Kaien, ke Pos Komando Taktis Satgas Pamtas di Skouw, menunjukkan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan upaya untuk menjaga hubungan baik di tingkat operasional.¹³⁸

Bentuk kerja sama militer yang paling konkret adalah Patroli Patok Bersama (PPB). Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh personel Satgas Pamtas TNI AD (misalnya Yonif MR 411/PDW Kostrad) dan PNGDF (dari 1 Royal Pacific Islands

¹³⁸ Admin TNI AD, "Satgas Yonif PR 501 Kostrad Terima Kunjungan Papua New Guinea Defense Force (PNGDF)," Tentara Nasional Indonesia, n.d., <https://tni.mil.id/view-132511-satgas-yonif-pr-501-kostrad-terima-kunjungan-papua-new-giunea-defense-force-pngdf.html>.

Regiment/RPIR). Tujuan utama PPB adalah verifikasi batas dan pemeliharaan patok perbatasan (misalnya di MM. 13.2). Kegiatan ini merupakan tindakan kedaulatan yang dijalankan bersama oleh kedua negara untuk mencegah sengketa batas yang tidak disengaja. Konsistensi dalam pelaksanaan PPB dan interaksi yang bersahabat antara pasukan dua negara ini merupakan indikator kunci stabilitas. Hubungan M2M yang stabil di Muara Tami berfungsi sebagai pilar penting untuk memastikan bahwa isu-isu kecil atau insiden lokal dapat diselesaikan di tingkat taktis tanpa harus mengganggu hubungan diplomatik yang lebih tinggi.¹³⁹

3.8 Peran Bea Cukai sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pos Lintas Batas Negara Skouw memainkan peran fundamental sebagai pelindung masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal yang secara langsung memengaruhi stabilitas keamanan wilayah timur Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan ini, PLBN Skouw didukung oleh unsur terpadu CIQS, yang mencakup *Customs* (Bea Cukai), *Immigration* (Imigrasi), *Quarantine* (Karantina), dan *Security* (TNI) Bea Cukai terikat erat dalam sistem terintegrasi ini, memastikan bahwa pengawasan kepabeanan adalah bagian integral dari pertahanan perbatasan.¹⁴⁰

¹³⁹ Tni, "Bersahabat, tni ad dan pngdf Gelar Patroli Patok Bersama Di Perbatasan RI-PNG."

¹⁴⁰ Admin bnpp, "Koordinasi Bersama CIQS, PLBN Skouw Evaluasi Aktivitas Perdagangan Di Lintas Batas Negara," Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (bnpp RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/koordinasi-bersama-ciqs-plbn-skouw-evaluasi-aktivitas-perdagangan-di-lintas-batas-negara>.

Peran fundamental Bea Cukai dalam memastikan bahwa semua pergerakan orang, kendaraan, dan barang yang melintasi perbatasan negara berlangsung sesuai dengan kerangka hukum, peraturan, dan prosedur kepabeanan yang berlaku. Bea Cukai Jayapura yang mengelola operasional kepabeanan di Skouw bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, menyusun standar prosedur, dan mengawasi kepatuhan. Fungsi ini menjadi sangat vital mengingat dinamika sosial-ekonomi di perbatasan yang melibatkan perdagangan tradisional berskala kecil dan kerawanan keamanan lintas batas.¹⁴¹

Tugas pemungutan Bea Masuk (BM) dan Cukai (BKC) didasarkan pada landasan hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Di wilayah kerja Bea Cukai Jayapura yang mencakup PLBN Skouw, penerimaan fiskal tidak hanya berasal dari Bea Masuk atas kegiatan impor tetapi juga mencakup Cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yaitu PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor. Kontribusi fiskal Bea Cukai Jayapura menunjukkan kinerja yang signifikan dalam pengumpulan penerimaan negara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, Bea Cukai Jayapura berhasil mengumpulkan total penerimaan negara sebesar Rp 8.148.187.978. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan, sebuah

¹⁴¹ Reza Abdi Esa. S. Baideng, "Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata Di Indonesia," *Lex et Societatis* II, no. 7 (2014): 61–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/5398/4905>.

pencapaian yang dikaitkan dengan efektivitas edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai kepada para pelaku usaha di wilayah kerjanya.¹⁴²

Selain menjalani tugas kebapeanan di PLBN Skouw, Khususnya Muara Tami. Penindakan Bea Cukai Jayapura bersama Pospol Subsektor Skouw pernah berhasil mengamankan 413 paket narkoba jenis ganja seberat total 10,95 kilogram. Tiga pelaku yang terlibat juga berhasil diringkus. Dalam kasus lain, patroli gabungan berhasil menemukan 1,74 kilogram ganja kering yang disembunyikan di jalur perbatasan. Bahkan, bibit ganja seberat 8 gram yang dibawa oleh seorang pelintas WNI dari PNG berhasil dideteksi melalui pemeriksaan X-ray dan koordinasi antara Imigrasi dan Bea Cukai.¹⁴³

¹⁴² BeaCukai.go.id, “Bea Cukai Jayapura Kumpulkan Penerimaan Negara Lebih 8 Milyar Rupiah,” *BeaCukai.Go.Id*, 2018, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jayapura-kumpulkan-penerimaan-negara-lebih-8-milyar-rupiah.html>.

¹⁴³ Admin Web Bea dan Cukai, “Bea Cukai Gagal Peredaran Narkoba Di Wilayah Papua,” Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagal-peredaran-narkoba-di-wilayah-papua.html>.

Gambar 3. 6 Bukti Penggagalan Penyebaran Narkoba Jenis Ganja Oleh Bea Cukai Jayapura Dan Pospol Subsektor Skouw



Sumber : Web Bea Cukai Jayapura

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-peredaran-narkotika-di-wilayah-papua.html>

Penemuan komoditas terlarang selanjutnya oleh Bea Cukai Jayapura diwilayah Muara Tami adalah Pengawasan dengan mesin X-ray juga berhasil mendeteksi benda berbahaya lainnya. Misalnya, petugas Bea Cukai Jayapura berhasil menindak seorang WNA yang membawa 2 butir amunisi (ukuran 5,56 mm dan 7,62 mm) serta 1 buah pisau lipat yang disembunyikan dalam tas noken.¹⁴⁴

Selanjutnya dalam sinergi Bea Cukai dengan Badan Karantina Indonesia sangat penting untuk mencegah penyelundupan komoditas hewan dan tumbuhan ilegal yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Adapun komoditas yang sering menjadi sasaran penyelundupan meliputi vanili dan

¹⁴⁴ Admin Web Bea dan Cukai, “Sinergi Bea Cukai Dan Aparat Penegak Hukum Amankan Perbatasan Timur Indonesia Dari Barang Ilegal,” Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-bea-cukai-dan-aparat-penegak-hukum-amankan-perbatasan-timur-indonesia-dari-barang-ilegal.html>.

buah pinang.¹⁴⁵ Pemusnahan 650 kilogram buah pinang ilegal yang disita dari seorang pelintas melalui jalur tikus dilakukan karena tidak memiliki dokumen karantina dan berpotensi menyebarkan hama. Penindakan lain mencakup pengembalian pelintas batas ke PNG karena membawa teripang tanpa dokumen karantina yang sah.¹⁴⁶

Gambar 3. 7 Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Vanili di Perbatasan Indonesia-PNG



Sumber : Website Bea dan Cukai
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-vanili-di-perbatasan-indonesia-png.html>

3.9 Peran Pemerintah Daerah sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami

Salah satu aktor pemerintah daerah dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini adalah Ketua Badan Pengelolal Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua (BPKLN) yaitu Suzana Dewijana Wanggai, S.Pd, MSocSc yang selalu mengikuti

¹⁴⁵ Admin Web bea cukai, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Vanili Di Perbatasan Indonesia-PNG,” Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-vanili-di-perbatasan-indonesia-png.html>.

¹⁴⁶ Dibuat Admin bnpp, “Patroli Gabungan PLBN Skouw Temukan Jalur Penyelundupan Dan Perusakan Fasilitas,” Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (bnpp RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/patroli-gabungan-plbn-skouw-temukan-jalur-penyelundupan-dan-perusakan-fasilitas>.

forum Border Liasion Officer Meetings yang setiap tahun selalu diadakan untuk membahas rancangan dan usulan petugas dilapangan yang selanjutnya akan diteruskan ke forum Border Liasion Meeting dan Joint Border Commite. Forum tersebut akan diadakan di Wewak yang mana Papua Nugini menjadi tuan rumah dalam menjalankan forum Oktober mendatang dalam upaya pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di wilayah perbatasan. Mulai dari arus keluar-masuk penduduk, persoalan kewarganegaraan, hingga praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan barang menjadi perhatian utama.¹⁴⁷

Selain ketua BPKLN, walikota Jayapura beberapa kali mengunjungi KRI Vanimo dan sebaliknya dalam kunjungan kerja yang membahas kerja sama sister city antara Jayapura dengan Vanimo (Provinsi Sandaun) Papua Nugini.¹⁴⁸ Peran pemerintah daerah Papua dan Kota Jayapura di Muara Tami adalah sebagai fasilitator forum seperti Border Liasion Meeting yang beberapa tahun terakhir diadakan di Jayapura dan Papua Nugini, sebagai contoh Keterlibatan Pemda dalam BLM sangat sentral. Sebagai bukti nyata, pertemuan BLM ke-18 pada Desember 2024 diselenggarakan di Merauke Provinsi Papua Selatan dengan Pj Sekda Papua Selatan sebagai tuan rumah dan pimpinan delegasi. Posisi Pemda di sini berfungsi sebagai *front-line implementer* kerja sama internasional. Agenda yang dibahas Pemda dalam BLM sangat terkait dengan keamanan lokal, termasuk pencegahan segala bentuk aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan penyelundupan

¹⁴⁷ Admin Web Papua, "Papua Siap Wakili Indonesia Di Pertemuan Bilateral Perbatasan Dengan PNG," Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua, 2025, <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-9392/papua-siap-wakili-indonesia-di-pertemuan-bilateral-perbatasan-dengan-png.html>.

¹⁴⁸ Y Tasik, "Evaluasi Penerapan Mou Pemerintah Kota Jayapura Dan Pemerintah Kota Vanimo Terkait Kerjasama Sister City," *Jurnal jendela* 10, no. 02 (2022): 33–43, <http://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/1050>.

yang mengancam stabilitas wilayah. Keterlibatan ini menegaskan bahwa Pemda secara langsung memanggul tanggung jawab untuk mendukung kebijakan strategis nasional di wilayah perbatasan.¹⁴⁹

Gambar 3. 8 Provinsi Papua Selatan Tuan Rumah Border Liaison Meeting Ke-18



Sumber : Website RRI

<https://rri.co.id/daerah/1180461/provinsi-papua-selatan-tuan-rumah-border-liasion-meeting-ke-18>

3.10 Aktor Transnational Yang Diterapkan Dalam Kerja Sama Perbatasan di Muara Tami

Dalam penerapan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam masalah perbatasan ada beberapa organisasi internasional yang membantu ataupun memiliki kewenangan dalam masalah keamanan perbatasan di Muara Tami seperti Melanesian Spearhead Group sebagai penyedia forum diskusi di wilayah regional asia pasific begitu juga Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam wawancara penulis dengan petugas Imigrasi Kanim 1 Jayapura Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw beliau

¹⁴⁹ Papua Nugini, "Indonesia Dan Papua Nugini Gelar Border Liaison Meeting (BLM) Ke-18 Di Merauke, Bahas Pengelolaan Perbatasan."

menyapaikan dan menjelaskan bahwa masyarakat atau ketua adat yang tinggal di wilayah perbatasan biasanya dipanggil untuk berkoordinasi terkait masalah-masalah perbatasan yang terjadi. Adapun peran masyarakat lokal yang ada di wilayah perbatasan hanya melakukan transaksi perdagangan dengan memanfaatkan pasar lokal yang ada di wilayah perbatasan Muara Tami yang biasanya terdapat pembeli WNA dari Papua Nugini berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵⁰

Tabel 3. 3 Tingkatan Aktor Dalam Multiple Channels dan Kerja Sama Yang Dijalin

No	Tingkatan dalam <i>Multiple Channels</i>	Aktor	Kerja sama yang dijalin
1	Interstate	Kementrian Luar Negeri	Dalam kerja sama <i>Joint Border Commite</i> untuk menyelesaikan masalah perbatasan, Kementrian Luar Negeri Indonesia dan Papua Nugini turut hadir dalam forum rapat untuk membahas masalah yang ada dilapangan seperti perbatasan, keamanan, dan diplomasi kedua negara. Sehingga hasil rapat forum JBC akan diturunkan ke forum <i>Border Liasion Meeting</i> untuk koordinasi lapangan bersama instansi yang memiliki kewenangan di wilayah perbatasan.

¹⁵⁰ Dita Angga Rusiana ria Sutrisna, "Uniknya Pasar PLBN Skouw, Belanja Bisa Pakai Rupiah Dan Kina," Kompas.com, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/08/17/182600178/uniknya-pasar-plbn-skouw-belanja-bisa-pakai-rupiah-dan-kina>.

2	Transgovermental	Imigrasi	<p>Di perbatasan Muara Tami, khususnya PLBN Skouw, Imigrasi memiliki peran untuk mengecek dokumen WNI dan WNA yang akan melintas, mengawasi orang yang akan melintas, dan memberi persetujuan orang yang akan melintas. Selain itu Imigrasi turut hadir untuk turun ke lapangan bersama instansi lain untuk patroli lapangan dalam mencegah masalah transnasional seperti peredaran narkoba dan <i>illegal traffic</i>.</p>
3	Transgovermental	BNPP	<p>BNPP memiliki peran sebagai pengambil kebijakan dalam sarana dan prasarana pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Muara Tami, BNPP juga Memfasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara dan Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan batas negara. Dengan begitu patroli lapangan dapat laporan evaluasi dari BNPP untuk memperbaiki patok perbatasan yang bolong atau rusak sehingga mengurangi masalah transnasional seperti penyelundupan</p>

			melalui jalan tikus diwilayah perbatasan.
4	Transgovernmental	TNI	TNI berperan sebagai koordinator dilapangan melakukan pengawasan dan patroli rutin terhadap patok batas negara untuk memastikan tidak ada pergeseran atau pelanggaran wilayah. diwilayah perbatasan. TNI juga melakukan penjagaan bersama PNGDF militer Papua Nugini untuk mengantisipasi adanya masalah transnasional seperti <input type="checkbox"/> penyelundupan barang, senjata, narkoba, serta pelintas batas ilegal ("jalur tikus") yang sering digunakan oleh Kelompok Separatis Teroris (OPM/KKB).
5	Transgovernmental	Bea Cukai	Bea Cukai berperan sebagai pengawasan barang yang diimpor dari luar dan diekspor keluar seperti barang berbahaya seperti narkotika, senjata, satwa yang dilindungi, dan produk ilegal lainnya yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Selain keamanan Bea Cukai memfasilitasi ekspor-impor yang sah, termasuk memberikan fasilitas kemudahan bagi UMKM dan industri sehingga Memungut bea masuk, bea keluar, dan pajak impor untuk penerimaan negara.

6	Transgovernmental	Pemerintah Daerah	<p>Dalam kerja sama <i>Border Liasion Meeting</i> Pemerintah Kota Jayapura dan Vanimo dalam satu tahun melakukan pertemuan dua kali untuk membahas agenda perbatasan, infrastruktur diwilayah perbatasan dan Pertukaran barang, perdagangan, dan pemberdayaan ekonomi warga di wilayah perbatasan. Hasil rapat dari forum <i>Border Liasion Meeting</i> inilah yang menjadi patokan instansi lapangan bekerja sesuai arahan kedua negara.</p>
7	Transnasional	Melanesian Spearhead Group	<p>Sebagai organisasi sub-regional <i>Melanesian Spearhead Group</i> turut hadir untuk menyelesaikan masalah perbatasan di Muara Tami yang mana MSG sebagai forum untuk menyelesaikan masalah-masalah separatis diwilayah perbatasan dan perannya perannya sebagai platform politik dan diplomatik tingkat tinggi untuk menegaskan prinsip-prinsip kedaulatan dan membatasi ruang gerak diplomasi separatis walaupun MSG tidak secara langsung mengelola operasi keamanan di perbatasan, kerangka kerjanya sangat penting dalam melegitimasi dan menyelaraskan upaya keamanan bilateral antara Indonesia dan Papua New Guinea.</p>

8	Transnasional	PT PLN	<p>PLN berperan sebagai penyedia infrastruktur listrik masyarakat Papua Nugini yang berada di sekitar perbatasan kedua negara karena salah satu alasan masalah transnasional ini terjadi adalah tidak sejahteranya masyarakat sekitar perbatasan. Sehingga PLN menjadi aktor lintas batas yang mendukung kerja sama kedua negara.</p>
9	Transnasional	DAMRI	<p>Damri berperan sebagai layanan angkutan umum yang menghubungkan mobilitas penduduk dan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang melakukan perjalanan lintas batas untuk kebutuhan perdagangan dan layanan kesehatan di Jayapura. Layanan angkutan lintas batas ini memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kawasan perbatasan dengan menurunkan biaya logistik dan mempermudah akses distribusi barang-barang kebutuhan pokok dari Indonesia ke wilayah perbatasan Papua Nugini.</p>
10	Transnasional	PT Telkom Indonesia	<p>PT Telkom Indonesia memiliki peran strategis sebagai (MNC) melalui penyediaan infrastruktur digital dan konektivitas internet lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini. Kehadiran infrastruktur</p>

			telekomunikasi yang dikelola oleh Telkom memberikan dampak domino pada integrasi ekonomi digital di titik-titik lintas batas seperti Skouw dan Wutung.
--	--	--	--

Sumber : tabel dibuat dan diolah sendiri oleh penulis

3.11 Temuan Hasil Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Menyelesaikan Masalah Perbatasan di Muara Tami Menggunakan *Multiple Channles*

Penerapan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini diperbatasan Muara Tami jika dilihat dalam kacamata *Multiple Channels* yang memiliki tiga tingkatan aktor yaitu interstate, transgovernmental dan transnasional, kerja sama ini seluruhnya memenuhi tiga tingkatan melainkan kerja sama kedua negara hanya menerapkan aktor interstate yang ada dalam kerja sama *Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship* dan forum Joint Border Commitee dan aktor transgovernmental yang diterapkan dalam kerja sama Border Liasion Meeting, Joint Technical Sub Committee on Security dan Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation and Mapping. Dengan begitu maka kerja sama kedua negara terimplementasi secara menyeluruh dan memenuhi pembagian variable *Multiple Channles* karena memenuhi klasifikasi aktor interstate, transgovernmental dan transnasional, dalam berperan menyelesaikan permasalahan perbatasan di Muara Tami dalam bidang keamanan perbatasan.